

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, TINGKAT
INFLASI DAN PENDAPATAN PER KAPITA REGIONAL
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH
MALANG RAYA TAHUN 2012-2016**

(Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah
Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang
Periode Tahun 2012-2016)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

FAISAL IZZAT BUSTHOMI

NIM. 145030407111010



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2018**

MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

“Memayu Hayuning Bawana, Ambrasta dur Hangkara”

hidup di dunia harus memelihara kedamaian, mengutamakan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan; serta membuang jauh sifat angkara murka, serakah dan tamak.



Teruntuk bapak dan ibuk, serta adik saya. Saya persembahkan skripsi ini untuk kalian yang selama ini telah menjadi motivator terbaik dalam setiap langkah saya hingga dalam pengerjaan skripsi ini. Terimakasih atas doa yang kalian panjatkan, nasihat dan dukungan yang selalu ada dalam setiap waktu. Tak lupa saya ucapkan terimakasih untuk sahabat-sahabat yang telah memberikan semangat dalam segala hal yang saya kerjakan.

Terimakasih.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi dan
Pendapatan Perkapita Regional terhadap Penerimaan Pajak
Daerah Malang Raya tahun 2012-2016

Disusun oleh : Faisal Izzat Busthomi

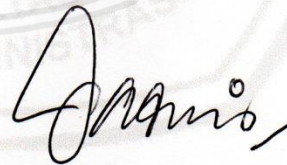
NIM : 145030407111010

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Perpajakan

Malang, 19 Desember 2018

Komisi Pembimbing



Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si
NIP.19600515 198601 1 002

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu

Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 18 Februari 2019

Jam : 08.00

Skripsi atas nama : Faisal Izzat Busthomi

Judul : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi dan
Pendapatan Perkapita Regional Terhadap Penerimaan Pajak
Daerah Malang Raya tahun 2012-2016

dan dinyatakan

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si

NIP.19600515 198601 1 002

Anggota,



Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si
NIP. 19570712 198503 1 001

Anggota,



Damus Dwi Anggoro, S.AB., MA
NIP.201607890 626 1 000



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 26 Desember 2018



Faisal Izzat Busthomi

145030407111010

RINGKASAN

Faisal Izzat Busthomi, 2018, **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi dan Pendapatan Perkapita Regional Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Malang Raya tahun 2012-2016**. Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si, 83 hal + xvi

Realisasi penerimaan daerah pada masing-masing Kabupaten/Kota wilayah Malang Raya yang meliputi, Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang yang dimana perkembangannya masih terjadi fluktuatif atau tidak stabil pada setiap tahunnya. Hal ini dapat dipastikan dengan adanya faktor-faktor yang berpengaruh dalam perekonomian masyarakat, seperti pertumbuhan perekonomian di masing-masing daerah, laju inflasi maupun pendapatan perkapita daerah-daerah tersebut. Faktor-faktor tersebut tiap tahunnya dapat mengalami pertumbuhan maupun penurunan. Seperti pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan pendapatan perkapita setiap masing-masing daerah yang berpengaruh dalam sektor perekonomian masyarakat dan memungkinkan akan berdampak terhadap pembayaran pajak daerah.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak daerah, mengidentifikasi pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan pendapatan perkapita regional pada masing-masing daerah di Malang Raya. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah penerimaan pajak daerah di Malang Raya, sedangkan variabel independennya adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pendapatan perkapita.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Lokasi penelitian yaitu berada di Dinas Pendapatan dan BPS masing-masing daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan mengambil data dari instansi terkait mengenai PAD dan nilai persentase pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan menggunakan data panel.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita regional berpengaruh dan signifikan, di sisi lain tingkat inflasi berpengaruh namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Malang Raya.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, Pendapatan Perkapita, Pajak Daerah

SUMMARY

Faisal Izzat Busthomi, 2018, The influence of economic growth , the level of inflation and income per capita of regional to local tax revenue Malang Raya a period of 2012-2016. Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si, 83 page + xvi

Realization of an area on each Malang Raya city which is, Batu city, Malang municipality and Malang city, who it is still going fluctuant or not stable at every year .It can be ascertained by the existence of the factors that influence in the economy of community, as the economic growth in each region, the inflation rate and a per capita income of local residents in the areas .All of these issues every year can experience and the decline in growth .Such as the economy growth, the inflation rate, with a per capita income every each region who is influential in the sector the economy of community and enables would have an impact on the payment of local taxes.

The purpose of this research is to know the growth of the local tax revenue, identify the influence of of the economic growth he , the level of inflation and a per capita income of regionally in masing-masing an area in miserable and to be pitied raya .In this research variables reaches as high as dependennya is the local tax revenue in Malang Raya , while variables reaches as high as indepennya is economic growth , the country inflation rate and a per capita income.

Was used in the study the kind of research descriptive of quantitative .The study locations is the former namely its location in the local treasury Dinas Pendapatan and BPS of the regions .The data used in this research is taken from secondary data with take the data from the related government agencies related to local revenue the and value of the percentage of economic growth of the regions .Of analysis that was used in this research was linear regression of multiple by using data panel

The result of the research indicated that the country economic growth with a per capita income influential and significant regional , on the other hand the inflation rate would be influential but not significant impact on the local tax revenue in Malang Raya.

Keywords: economic growth, inflation rate, income per capita, local taxes

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan berkat, rahmat, hidayah dan perlindungan-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi dan Pendapatan Perkapita Regional terhadap Penerimaan Pajak Daerah Malang Raya tahun 2012-2016**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Drs. Bambang Supriyono,MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieg, MBA, selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Saparila Worokinasih, S.sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi Perpajakan.
4. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, ilmu, dan pikirannya untuk membimbing, menasihati, dan membantu menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu dosen dan staf Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan kelancaran dan ilmunya kepada peneliti, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.
6. Badan Keuangan Daerah Kota Batu, Badan Penerimaan Pajak Daerah Kota Malang, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, BPS Kota Batu, BPS Kota Malang, dan BPS Kabupaten Malang yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
7. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan kasih sayang kepada peneliti.
8. Teman-teman organisasi kampus, HIMAPAJAK yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran berharga yang kelak pelajaran tersebut bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat.
9. Keluarga Cemblek yang selalu ada waktu dan tempat untuk berkeluh kesah.
10. Teman-teman sejak awal semester, Malvin, Yasmin, Firman, Amle, Ryandi, Unggul, Lia, Articha yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi.
11. Teman-teman Himawari yang sudah memberikan dukungan secara penuh kepada penulis.
12. Keluarga besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan kenangan berharga.
13. Keluarga besar Universitas Brawijaya terimakasih atas semua kenangan indah dan pelajaran hidupnya.



14. Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu dan melancarkan selesainya skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 26 Desember 2018



Peneliti

DAFTAR ISI

MOTTO DAN HALAM PERSEMBAHAN	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kontribusi Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Empiris	9
B. Tinjauan Teoritis	12
1. Pengertian Keuangan Daerah.....	12
2. Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	13
3. Inflasi	15
4. Pendapatan Perkapita.....	18
5. Hubungan Variabel Independen terhadap Variabel Dependen	20
6. Definisi dan Ruang Lingkup Pajak	22
7. Jenis-jenis Pajak dan Pengelompokannya	29
8. Pengertian Pajak Daerah dan Ruang Lingkupnya	29
9. Hipotesis	31
C. Kerangka Pemikiran Teoritis.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	36
C. Definisi Operasional Variabel	36
D. Jenis dan Sumber Data	38
E. Metode Pengumpulan Data	39



F. Metode Analisa Data dan Uji Hipotesis	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Gambaran Umum Daerah Malang Raya	
Wilayah Provinsi Jawa Timur	51
B. Hasil Analisa dan Intreprestasi	51
1. Hasil Analisa Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	
Pada Kabupaten/Kota Di Malang Raya Wilayah	
Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016.....	51
2. Hasil Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik dan	
Analisis Regresi Linier Berganda	53
a) Asumsi-Asumsi Klasik Regresi	53
b) Persamaan Regresi Linier Berganda	60
c) Koefesien Determinan (R^2).....	62
d) Pengujian Hipotesis.....	63
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
Tabel 1.1	Data Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota Di Malang Raya Tahun 2012-2016.....	4
Tabel 2.1	Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang.....	12
Tabel 4.1	Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Di Malang Raya Tahun 2012-2016.....	52
Tabel 4.2	Hasil Uji Normalitas	54
Tabel 4.3	Hasil Uji Autokorelasi.....	57
Tabel 4.4	Hasil Uji Multikolinearitas.....	58
Tabel 4.5	Persamaan Regresi	61
Tabel 4.6	Koefisien Korelasi dan Determinasi	62
Tabel 4.7	Hasil Uji F/Serempak.....	64
Tabel 4.8	Hasil Uji t/Parsial	65

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
	Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	34
	Gambar 4.1 Grafik Nilai Rata-rata Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Malang Raya Tahun 2012-2016	52
	Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas	60



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
Lampiran I	Data Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Malang Raya Tahun 2012-2016.....	74
Lampiran II	Data Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Di Malang Raya Tahun 2012-2016.....	74
Lampiran III	Data Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012-2016.....	75
Lampiran IV	Data Penerimaan Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2012-2016.....	76
Lampiran V	Data Penerimaan Pajak Daerah Kota Batu Tahun 2012-2016.....	77
Lampiran VI	Tingkat Inflasi (TI) Kabupaten/Kota Di Malang Raya Tahun 2012-2016.....	78
Lampiran VII	Data Pendapatan Perkapita Regional (PPr) Kabupaten/Kota Di Malang Raya Tahun 2012-2016.....	78
Lampiran VIII	Susunan Data Panel.....	79
Lampiran IX	Hasil Analisis Deskriptif.....	80
Lampiran X	Asumsi Klasik.....	80
	1. Uji Auto Korelasi.....	80
	2. Uji Multikolienaritas.....	80
	3. Uji Heterokedastisitas.....	81
	4. Uji Normalitas.....	82
Lampiran XI	Regresi Linier Berganda.....	82
Lampiran XII	Hasil Uji Hipotesis.....	82
	1. Uji F/Simultan.....	83
	2. Uji t/Parsial.....	83



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak memiliki andil yang sangat besar di Negara Indonesia. Faktanya 60% hingga 70% pendapatan pemerintah berasal dari pajak. (<http://www.pajak.go.id>, 19 Januari 2018). Dengan pentingnya peranan pajak, maka Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral pajak telah melakukan berbagai upaya unuk memaksimalkan penerimaan pajak. Upaya Pemerintah dimulai melalui reformasi peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan pada tahun 1983. Sejak saat itu mulai diberlakukanya *self-assesment system* dalam pemungutan pajak. Sebelum era reformasi perpajakan, sistem pemungutan pajak yang ditetapkan adalah *official assesment system*. Penentuan besar pajak yang dipungut dari wajib pajak ditentukan oleh pemungut pajak yaitu: Pemerintah, sehingga yang menghitung dan menagih pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak (WP) adalah Pemerintah (fiskus). Jadi wajib pajak bersifat pasif mengikuti ketentuan dan perhitungan fiskus. Salah satu cara yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan adalah melakukan pembaharuan pajak atau lebih dikenal dengan reformasi perpajakan.

Reformasi perpajakan diharapkan akan mampu meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan. Sebagaimana yang diharapkan dalam pokok-pokok pikiran dan pokok-pokok perubahan Undang-undang No.16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, bahwa

kebijakan pokok dibidang pajak ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pajak menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan. Penerimaan pajak dimanfaatkan untuk penyedia berbagai sarana prasarana ekonomi berupa jalan, jembatan, pelabuhan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan fasilitas lain yang mendukung kepentingan umum untuk membantu kesejahteraan rakyat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi terdiri atas Daerah-daerah Kabupaten dan Kota. Tiap-tiap Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahannya, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Dalam hal ini, Pajak Daerah diatur dalam UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009. Dimana desentralisasi atau otonomi Daerah membuat Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu: mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Mayasari, 2009:1).

Kewenangan dalam urusan Keuangan Daerah yang memberikan hak untuk memberdayakan segala potensi perekonomian Daerah yang ada menyebabkan Pemerintah Daerah berusaha menggali sumber-sumber perekonomian Daerah yang dapat dijadikan pendapatan Daerah. Salah satunya adalah pendapatan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana mengenai

pajak daerah ini ditetapkan berdasarkan peraturan Daerah masing-masing dengan mengingat dan memandang kemampuan Daerah dalam penarikan pajak untuk penerimaan Daerah (Ayuningtyas, 2008:2).

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintah Daerah terdiri atas PAD, dana perimbangan, pinjaman Daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD, yang salah satunya berupa pajak Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah. Keberhasilan pembangunan suatu daerah juga dapat dilihat dari besar kecilnya tingkat kesenjangan antar wilayah dan meningkatnya produksi barang dan jasa yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan dan juga dipengaruhi oleh laju inflasi. Menurut Tendelilin (2001:212-213) Inflasi adalah kecenderungan terjadinya peningkatan harga produk-produk secara keseluruhan, dengan demikian jika harga barang-barang naik maka pajak yang dikenakan atas harga barang tersebut akan meningkat secara nominal. Selain itu PDRB juga merupakan cerminan dari pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita suatu daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan perkapita, masyarakat mempunyai pengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa penerimaan pajak daerah dapat terpengaruhi oleh faktor-faktor yang tiap tahunnya dapat mengalami pertumbuhan maupun penurunan. Seperti pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan pendapatan perkapita setiap masing-masing daerah yang berpengaruh dalam sektor perkonomian masyarakat dan

memungkinkan akan berdampak terhadap pembayaran pajak daerah. Untuk mengetahui seberapa besar peran dan pengaruhnya dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pendapatan perkapita regional terhadap penerimaan pajak daerah maka secara spesifik akan dibahas dan ditinjau secara empiris mengenai kondisi penerimaan Pajak Daerah Malang Raya yang terdiri dari: Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang

Selanjutnya proporsional atas realisasi penerimaan daerah pada masing-masing Kabupaten/Kota di wilayah Malang Raya mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dapat diuraikan pada sajian Tabel 1.1 sebagai Berikut:

Tabel 1.1 Data Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota Di Malang Raya Tahun 2012-2016

Tahun	Kabupaten Malang	Kota Malang	Kota Batu
2012	71.301.888.449,61	158.642.650.581,89	28.187.860.661,00
2013	95.889.778.087,00	238.499.748.161,57	44.853.946.415,32
2014	102.408.650.526,00	278.885.189.548,87	62.807.445.882,00
2015	170.108.822.450,00	316.811.710.702,76	83.692.699.934,00
2016	191.399.578.232,88	374.641.673.420,19	88.757.389.919,00

Sumber: *Dinas Pendapatan Daerah masing-masing wilayah, 2018.*

Berdasarkan uraian Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan daerah pada masing-masing Kabupaten/Kota wilayah Malang Raya perkembangannya terus meningkat, kecuali Kota Batu pada tahun 2014 yang mengalami penurunan secara signifikan. Dari substansi latar belakang diatas, maka secara spesifik akan dibahas dan ditinjau secara empiris mengenai kondisi penerimaan Pajak Daerah Malang Raya yang terdiri dari: Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang di wilayah Provinsi Jawa Timur, melalui penelitian ini yang fokus dengan judul: **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,**

Tingkat Inflasi dan Pendapatan Perkapita Regional Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Malang Raya Tahun 2012-2016”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari substansi latar belakang diatas, tentang pentingnya penerimaan Pajak Daerah Malang Raya di wilayah Provinsi Jawa Timur, maka yang menjadi permasalahan esensial dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah pertumbuhan penerimaan pajak daerah malang raya tahun 2012-2016 mengalami peningkatan?
- 2) Apakah pertumbuhan ekonomi regional berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah malang raya tahun 2012-2016?
- 3) Apakah tingkat inflasi regional berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah malang raya tahun 2012-2016?
- 4) Apakah pendapatan perkapita regional berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah malang raya tahun 2012-2016?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai secara obyektif dengan dilakukannya penelitian terhadap suatu masalah yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya. Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada masalah dari latar belakang penelitian.

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak daerah malang raya tahun 2012-2016.
2. Mengidentifikasi pengaruh pertumbuhan ekonomi regional terhadap penerimaan pajak daerah malang raya tahun 2012-2016.
3. Mengidentifikasi pengaruh tingkat inflasi regional terhadap penerimaan pajak daerah malang raya tahun 2012-2016.
4. Mengidentifikasi pengaruh pendapatan perkapita regional terhadap penerimaan pajak daerah malang raya tahun 2012-2016.

D. Kontribusi Penelitian

Setiap penelitian tentu mempunyai kegunaan (manfaat) penelitian yang berguna bagi lembaga pendidikan, bagi instansi yang dijadikan objek penelitian dan juga dapat berguna bagi peneliti itu sendiri. Dimana hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat. Adapun kegunaan (manfaat) atas penelitian ini antara lain:

1. Kontribusi Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan terkait kinerja keuangan Daerah dan dapat dijadikan sebagai referensi pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerimaan pajak Daerah serta untuk meningkatkan pengetahuan peneliti mengenai keuangan Daerah khususnya penerimaan Pajak Daerah yang terdapat pada seluruh Kabupaten/Kota di Malang Raya wilayah Provinsi Jawa Timur atau dapat digunakan sebagai literatur pada obyek penelitian yang lainnya.

2. Kontribusi Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi saran serta masukan, untuk evaluasi dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada seluruh Kabupaten/Kota di Malang Raya wilayah Provinsi Jawa Timur, untuk meningkatkan kinerja keuangan Daerah secara proaktif dan efektif. Serta dapat dijadikan indikator dalam evaluasi kinerja, peran dan fungsi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada seluruh Kabupaten/Kota di Malang Raya wilayah Provinsi Jawa Timur dalam memformulasikan kebijakan strategis untuk meningkatkan sumber-sumber potensi penerimaan Pajak Daerah.

E. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan penerimaan Pajak Daerah yang terdapat pada seluruh Kabupaten/Kota di Malang Raya wilayah Provinsi Jawa Timur. Hal ini juga menguraikan rumusan masalah, tujuan masalah, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan skripsi secara ringkas.

BAB II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi pemaparan mengenai penelitian terdahulu dan dasar-dasar teoritis terkait dengan tema yang peneliti angkat yang akan digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB III Metode Penelitian

Bab dalam metode ini berisi penjelasan mengenai dari jenis penelitian, lokasi atau obyek penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisa data dan uji hipotesis.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang hasil penelitian yang diinterpretasikan dari instrumen data yang diperoleh oleh peneliti serta hasil analisis yang diperoleh melalui metode analisa penelitian yang berdasarkan atas rumusan masalah, tujuan penelitian dan metode analisa penelitian yang diformulasikan oleh peneliti.

BAB V Penutup

Bab ini berisi pemaparan secara singkat kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti. Selain dalam bab ini juga memaparkan tentang saran yang disampaikan oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh penerimaan pajak Daerah telah banyak dilakukan. Dimana peneliti melakukan tinjauan secara empiris terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian, adapun penelitian tersebut antara lain:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Sri Utami (2015) yang berjudul: Pengaruh Struktur Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Terhadap Rasio Pajak Pada Negara-Negara ASEAN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan indeks persepsi korupsi terhadap rasio pajak baik secara bersama-sama maupun secara parsial. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui variabel yang mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap rasio pajak di Negara-Negara ASEAN.

Metode analisa yang digunakan adalah regresi linier berganda, uji parsial (uji t), uji simultan (uji F) dan koefisien determinasi (R²). Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks persepsi korupsi (IPK) berpengaruh terhadap rasio pajak secara bersama-sama sebesar 72,80%, sedangkan pengaruh

lainnya sebesar 27,20% dipengaruhi oleh faktor yang lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Fachry Ali Rafsanjani, Kertahadi dan Siti Ragil Handayani (2015) yang berjudul: Pengaruh Tingkat Inflasi, Pengangguran dan Pendapatan Perkapita Regional Terhadap Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah (Studi Pada Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Periode Tahun 2004-2013). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi, pengangguran dan pendapatan perkapita regional periode 2004 sampai dengan periode 2013. Metode analisa yang digunakan adalah regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperoleh dari hasil uji F adalah variabel-variabel independen mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel penerimaan pajak dan retribusi daerah. Sedangkan untuk uji t didapatkan bahwa tingkat inflasi, jumlah pengangguran dan pendapatan perkapita regional mempunyai pengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah.

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Amalia Wijayanti (2015) yang berjudul: Analisis Penerimaan Pajak Indonesia (Pendekatan Ekonomi Makro).

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perilaku efek jangka panjang dan jangka pendek variabel-variabel ekonomi makro, berupa produk domestik bruto (PDB) riil, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap USD, serta belanja Negara, terhadap penerimaan pajak Indonesia selama periode 1976-2013. Metode analisa yang digunakan adalah regresi linier berganda

dengan digunakan model koreksi kesalahan (Error Correction Model/ECM) untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel ekonomi makro terhadap penerimaan pajak dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa penerimaan pajak Indonesia dipengaruhi oleh variabel PDB, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dan belanja Negara, sedangkan variabel inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak Indonesia dalam model jangka panjang. Pada model jangka pendek penerimaan pajak Indonesia hanya dipengaruhi oleh belanja Negara, sedangkan variabel lainnya tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Indonesia. Pada estimasi model jangka pendek juga diperoleh nilai koefisien bentuk koreksi kesalahan (*Error Correction Term/ECT*) sebesar 0,221 yang menunjukkan bahwa ketidaksesuaian penerimaan pajak yang terjadi pada jangka panjang akan dikoreksi sebesar 22 persen.

Perbedaan dan persamaan penelitian sekarang dibandingkan penelitian sebelumnya dapat diuraikan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang

No	Judul Peneliti, Nama Peneliti dan Tahun Penelitian Terdahulu	Judul Peneliti, Nama Peneliti dan Tahun Penelitian Sekarang	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh Struktur Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Terhadap Rasio Pajak Pada Negara-Negara ASEAN, Sri Utami (2015)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi dan Pendapatan Perkapita Regional Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Malang Raya Tahun 2012-2016, Faisal Izzat B, (2018)	Variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi sebagai variabel independen dan metode analisa data menggunakan uji regresi linier berganda	Obyek penelitian, penelitian terdahulu menggunakan Rasio Pajak sebagai variabel dependen dan penelitian sekarang menggunakan penerimaan pajak daerah sebagai variabel dependen
2	Pengaruh Tingkat Inflasi, Pengangguran dan Pendapatan Perkapita Regional Terhadap Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah (Studi Pada Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Periode Tahun 2004-2013), Fachry Ali Rafsanjani, Kertahadi dan Siti Ragil Handayani (2015)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi dan Pendapatan Perkapita Regional Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Malang Raya Tahun 2012-2016, Faisal Izzat B, (2018)	Metode analisa data menggunakan uji regresi linier berganda, variabel Tingkat Inflasi dan Pendapatan Perkapita Regional sebagai variabel independen serta Penerimaan Pajak sebagai variabel dependen	Obyek penelitian dan waktu penelitian
3	Analisis Penerimaan Pajak Indonesia (Pendekatan Ekonomi Makro), Amalia Wijayanti (2015)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi dan Pendapatan Perkapita Regional Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Malang Raya Tahun 2012-2016, Faisal Izzat B, (2018)	Variabel Inflasi sebagai variabel independen dan metode analisa data menggunakan uji regresi linier berganda.	Objek penelitian, penelitian sekarang menggunakan variabel Ekonomi Makro yang berupa Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Pendapatan Perkapita Regional sebagai variabel independen

Sumber: *Data diolah peneliti, 2018.*

B. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Keuangan Daerah

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran dan pendapatan dan belanja daerah (APBD). Oleh karena itu, pengertian keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian APBD, yaitu: suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan.

Selain itu, APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dari definisi keuangan daerah tersebut melekat 4 (empat) dimensi:

- 1) Adanya dimensi hak dan kewajiban
- 2) Adanya dimensi tujuan dan perencanaan
- 3) Adanya dimensi penyelenggaraan dan pelayanan publik
- 4) Adanya dimensi nilai uang dan barang (investasi dan inventarisasi)

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah (Sukirno, 2004). Dimana masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang dari satu periode ke periode lainnya. Dapat juga dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses berkesinambungan dimana suatu Negara mengalami perubahan keadaan

yang lebih baik. Selain itu pertumbuhan ekonomi adalah sebuah peningkatan kapasitas atas produksi barang dan jasa dari satu periode dibandingkan periode berikutnya. Dalam Sukirno (2004: 408) Pertumbuhan ekonomi dapat diukur secara nominal, yang meliputi inflasi atau secara riil yang menyesuaikan dengan inflasi. Untuk membandingkan pertumbuhan ekonomi satu Negara dengan Negara yang lain, GDP (*Gross Domestic Product*) atau GNP (*Gross National Product*) perkapita harus digunakan mengingat adanya perbedaan populasi penduduk antar Negara.

Biasanya pertumbuhan ekonomi diukur dengan memperhitungkan GDP Negara, namun karena adanya inflasi, para ekonom dan analis sering memilih untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dengan perubahan presentase tahunan GDP riil dan perubahan presentase tahunan GDP perkapita. Pertumbuhan GDP riil mengukur seberapa cepat ekonomi berkembang, sedangkan pertumbuhan GDP perkapita mengukur daya beli masyarakat atas barang dan jasa disuatu Negara. Dengan begini efek dari inflasi dihapuskan dari perhitungan pertumbuhan ekonomi.

Dapat diartikan juga kenaikan pendapatan nasional sebagai perwujudan proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat mengindikasikan adanya suatu pertumbuhan ekonomi. Dari beberapa pengertian tersebut, jelaslah pertumbuhan ekonomi seperti namanya adalah keadaan bertumbuhnya keadaan perekonomian suatu Negara yang diukur dari perbandingan satu periode keperiode berikutnya secara berkesinambungan.

3. Inflasi

Menurut Adiwarman Karim (2007: 134), inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Dengan kata lain, inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Artinya, nilai harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling berpengaruh. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadang kala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga.

Adiwarman Karim (2007: 135), menyatakan bahwa secara umum inflasi berarti kenaikan harga secara umum dari barang/komoditi dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu komoditis. Definisi inflasi oleh para ekonom modern adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit perhitungan moneter) terhadap barang-barang/komoditas dan jasa. Sebaliknya, jika terjadi adalah penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap barang-barang/komoditas dan jasa didefinisikan deflasi (*deflation*).

Inflasi adalah salah satu peristiwa moneter yang menunjukkan kecendrungan akan naiknya harga-harga barang secara umum, yang berarti terjadinya penurunan nilai uang. Penyebab utamanya dan satu-satunya yang memungkinkan gejala ini muncul adalah akibat terjadinya kelebihan uang

yang beredar sebagai akibat penambahan jumlah uang dimasyarakat (Poppy Marieskha, 2009).

Menurut Jenisnya Sadono Sukirno (2004), menyatakan bahwa berdasarkan derajatnya, inflasi dibedakan menjadi sebagai berikut:

- 1) Inflasi ringan, terjadi apabila kenaikan harga berada dibawah angka 10% setahun.
- 2) Inflasi sedang, terjadi apabila kenaikan harga berada antara 10%-30% setahun.
- 3) Inflasi berat, terjadi apabila kenaikan harga berada antara 30%-100% setahun.
- 4) Hiperinflasi (inflasi tak terkendali), terjadi apabila berada diatas 100% setahun

Dalam Sadono Sukirno (2004: 338), menyatakan bahwa efek-efek buruk dari inflasi antara lain:

a. Inflasi dan Perkembangan Ekonomi

Inflasi yang tinggi, dimana tingkatannya akan menghambat perkembangan ekonomi. Biaya yang terus menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Maka pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi. Investasi produktif akan berkurang dan tingkat kegiatan ekonomi akan menurun. Sebagai akibatnya lebih banyak pengangguran akan terwujud.

Kenaikan harga-harga juga menimbulkan efek buruk pula keatas perdagangan.

Kenaikan harga menyebabkan barang-barang Negara itu tidak dapat bersaing dipasaran internasional, selanjutnya ekspor akan menurun. Sebaliknya, harga-harga produksi dalam negeri yang semakin tinggi sebagai akibat inflasi menyebabkan barang-barang impor relatif murah, maka lebih banyak impor yang dilakukan. Ekspor yang menurun dan diikuti oleh impor yang bertambah menyebabkan ketidakseimbangan dalam aliran mata uang asing. Kedudukan neraca pembayaran akan memburuk.

b. Inflasi dan kemakmuran rakyat

Disamping menimbulkan efek buruk keatas kegiatan ekonomi Negara, dimana inflasi juga akan menimbulkan efek-efek terhadap individu dan masyarakat.

c. Inflasi akan menurunkan pendapatan riil orang-orang yang berpendapatan tetap.

Pada umumnya kenaikan upah tidaklah secepat kenaikan harga-harga. Maka inflasi akan menurunkan upah riil individu-individu yang berpendapatan tetap. Sehingga daya beli masyarakat juga akan menurun.

d. Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang.

Sebagian kekayaan masyarakat disimpan dalam bentuk uang. Simpanan di bank, simpanan tunai dan simpanan dalam institusi-institusi

keuangan lain merupakan simpanan keuangan. Nilai riilnya akan menurun, apabila inflasi berlaku.

e. Memperburuk pembagian kekayaan

Telah ditunjukkan bahwa penerima pendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan dalam nilai riil pendapatannya dan pemilik dari kekayaan bersifat dengan keuangan yang mengalami penurunan dalam nilai riil kekayaannya. Selain itu juga sebagian penjual/pedagang akan dapat mempertahankan nilai riil dari pendapatannya. Dengan demikian inflasi menyebabkan pembagian pendapatan diantara golongan berpendapatan yang tetap dengan pemilik-pemilik harta tetap dan penjual/pedagang akan menjadi semakin tidak merata

4. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu Negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan perkapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi penduduk suatu Negara pada suatu periode tertentu. Dimana pendapatan perkapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu Negara pada tahun tersebut (Sukirno, 2004: 423). Menurut Purbayu Budi Santoso dan Muliawan Hamdani (2007: 68), menyatakan bahwa ukuran kesejahteraan penduduk suatu Negara biasanya juga didasarkan atas besarnya jumlah pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita merupakan bentuk rata-rata yang diperoleh dari pembagian jumlah produk nasional bruto oleh jumlah keseluruhan penduduk. Semakin besar nilai pendapatan perkapita,

diasumsikan bahwa anggota masyarakat suatu Negara makin sejahtera dan pembangunan perekonomian dinilai makin berhasil. Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk disuatu Negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu Negara dengan jumlah penduduk Negara tersebut pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah Negara, semakin besar pendapatan perkapitanya semakin makmur Negara tersebut.

Menurut Sadono Sukirno (2004: 424), menyatakan bahwa salah satu komponen dari pendapatan nasional yang selalu dilakukan perhitungannya adalah pendapatan perkapita yaitu: pendapatan rata-rata penduduk suatu Negara pada suatu masa tertentu. Nilainya diperoleh dengan membagi nilai Produk Domestik Bruto atau Produk Nasional Bruto suatu tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Dengan demikian pendapatan perkapita dapat dihitung dengan menggunakan salah satu formula berikut:

$$\text{PDB Perkapita} = \frac{PDB}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

$$\text{PNB Perkapita} = \frac{PNB}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

5. Hubungan Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

a. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur perkembangan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara maka semakin bagus tingkat perekonomiannya. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya (Kuznets dalam Purnamasari, 2009:11). Selain itu Bruckner (2011:9) dalam penelitiannya menemukan bahwa kenaikan produk domestik bruto (PDB) dalam suatu negara dapat mempengaruhi penerimaan pajak tersebut. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, dimana ketika terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi maka semakin besar penerimaan dari sektor perpajakan.

b. Hubungan Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Rosyidi (2002) hubungan Inflasi dengan Penerimaan pajak berbanding terbalik. Terdapat perbedaan antara pengetahuan ekonomi sisi pemerintahan dengan sisi ekonomi penawaran antara inflasi dengan pajak. Apabila terjadi kenaikan atau penurunan harga maka jumlah barang yang dapat dibeli oleh masyarakat akan mengalami perubahan, yang berdampak pada penerimaan pajak. Dapat disimpulkan

bahwa Tingkat Inflasi berhubungan negatif terhadap Penerimaan Pajak. Dimana ketika suatu inflasi terjadi kenaikan dalam suatu daerah maka akan terjadi penurunan terhadap penerimaan pajak.

c. Hubungan Pendapatan Perkapita terhadap Penerimaan Pajak

Pada umumnya di negara berkembang, sebagian besar penerimaan pajaknya berasal dari jenis pajak tidak langsung. Hal ini disebabkan pada negara berkembang golongan berpenghasilan tinggi lebih rendah persentasenya. Namun dalam jangka panjang akan terjadi pergeseran dari dominasi pajak tak langsung menjadi pajak langsung sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat setempat. Pendapatan perkapita merupakan gambaran kemampuan dari masyarakat suatu negara. Tingkat pendapatan perkapita suatu negara menjadi tolak ukur kemakmuran negara tersebut. Menurut Prastyo (2010) peningkatan kemampuan ekonomi biasanya diiringi dengan ketaatan terhadap pembayaran pajak, karena bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi pajak tidak menjadi beban yang begitu berat. Berdasarkan uraian tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa peningkatan pendapatan perkapita masyarakat dalam suatu negara akan sangat mempengaruhi besarnya penerimaan pajak.

6. Definisi dan Ruang Lingkup Pajak

a. Definisi Pajak

Pajak menurut Pasal 1 ayat 1 UU No.28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah: “Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dimana definisi Pajak menurut beberapa ahli, antara lain:

- 1) Prof. Dr. P. J. A. Adriani Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
- 2) Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat

kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

b. Ciri Pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak menurut Resmi (2014:5) antara lain sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dalam undang-undang".
- 2) Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
- 3) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

- 4) Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- 5) Selain fungsi *budgetair* (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

c. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Resmi (2014:3) pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1) Fungsi Penganggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran

rutin. Dimana tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2) Fungsi Pengaturan (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

d. Syarat Pemungutan Pajak

Dalam Fidel (2010: 14), pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

1) Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

2) Pengaturan pajak harus berdasarkan UU

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu: Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya; Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum; Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

3) Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

4) Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah dari pada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

e. Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011: 7), mengatakan dalam bukunya bahwa pada dasarnya terdapat 3 (tiga) cara/sistem yang dipergunakan untuk menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang terutang oleh seseorang. Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) antara lain:

1) *Official Assessment System*; sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada Pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini

sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984. Dimana ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini, antara lain:

- a. Pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak
- b. Wajib pajak bersifat pasif, dan
- c. Hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

2) *Self Assessment System*; sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini antara lain:

- a. Pajak terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak
- b. Wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar, dan
- c. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat, kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja, seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

1) *Withholding System*; sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain Pemerintah dan wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

7. Jenis-jenis Pajak dan Pengelompokannya

Dalam Resmi (2014:7), pembagian pajak dapat didasarkan pada hal-hal berikut:

1. Pajak berdasarkan golongan
 - a) Pajak langsung
 - b) Pajak tidak langsung
2. Pajak berdasarkan wewenang pemungut
 - a) Pajak Pusat/Negara
 - b) Pajak Daerah
- 1) Pajak berdasarkan sifat
 - a) Pajak subjektif
 - b) Pajak objektif

8. Pengertian Pajak Daerah dan Ruang Lingkupnya

a. Pajak Daerah

Menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Pajak Daerah: Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Jenis Pajak Daerah

Adapun jenis pajak Daerah menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009, yang dibagi menjadi:

- 1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
- 2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet

c. Bagi Hasil Pajak Provinsi

Hasil penerimaan Pajak Provinsi sebagian diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota diwilayah Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen).
2. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten atau Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
3. Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
4. Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh persen).

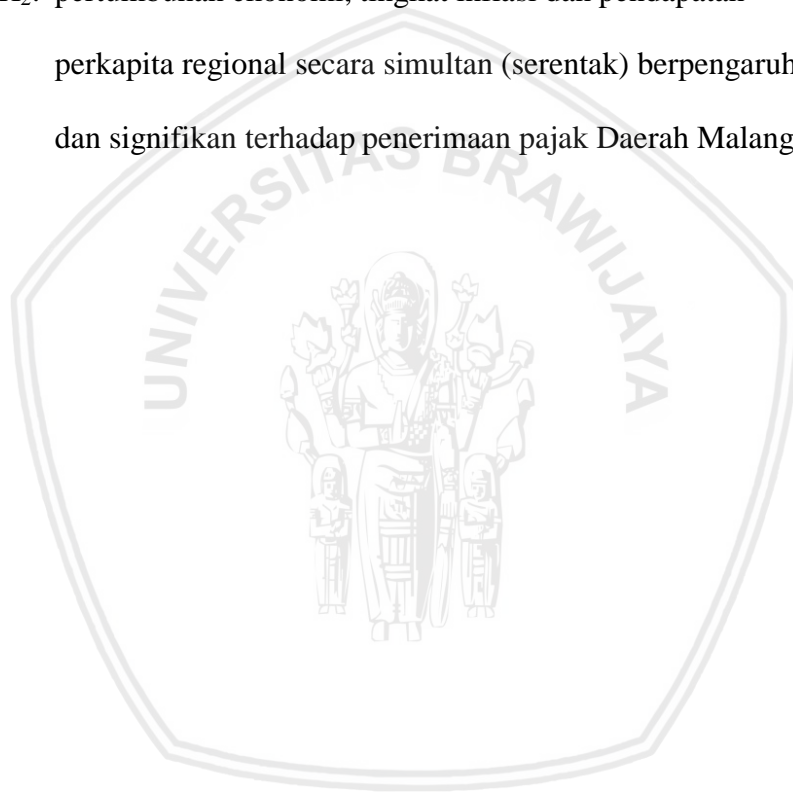
Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berbeda pada satu wilayah Kabupaten/Kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan yang dimaksud, untuk diserahkan kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

9. Hipotesis

Hipotesis adalah pendapat sementara dan pedoman serta arah dalam penelitian yang disusun berdasarkan pada teori yang terkait, dimana suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih (J. Supranto, 2007). Berdasarkan latar belakang, perumusan permasalahan, tujuan masalah dan kajian teoritis penelitian yang

telah diuraikan diatas. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

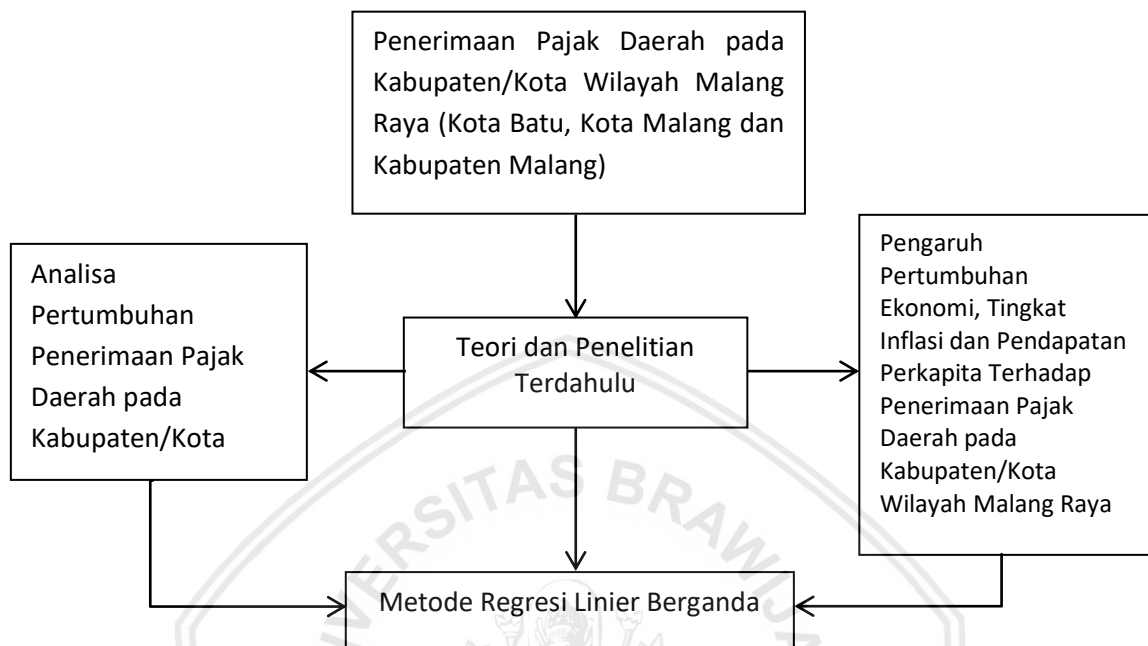
- 1) H_1 : pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan pendapatan perkapita regional secara parsial (individu) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak Daerah Malang Raya
- 2) H_2 : pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan pendapatan perkapita regional secara simultan (serentak) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak Daerah Malang Raya.



C. Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka Pemikiran Teoritis adalah model konseptual yang menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti (Sugiyono, 2011: 60). Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Selain itu kerangka pemikiran teoritis merupakan acuan untuk memfokuskan dalam penelitian. Kerangka juga merupakan penyederhanaan dan menjadi landasan dalam tujuan penelitian. Selain itu kerangka pemikiran dalam penelitian merupakan suatu konsep kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan jawaban dari hipotesis yang diambil dari obyek penelitian untuk menentukan deskripsi atas suatu masalah yang dieksploirasi dalam penelitian.

Berdasarkan pokok permasalahan dan hipotesis yang telah dikemukakan dari hasil tinjauan teoritis untuk dilakukan analisis data secara kuantitatif, sehingga hasil studi kasus dalam penelitian dapat dijadikan referensi maupun acuan oleh berbagai pihak seperti halnya oleh Dinas Pendapatan Daerah pada seluruh Kabupaten/Kota di Malang Raya wilayah Provinsi Jawa Timur dan oleh instansi yang lainnya. Maka perlu dianalisis lebih lanjut melalui penelitian ini yang dianalogikan pada sajian Gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

Sumber: Data Diolah, 2017.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data *numerical* (angka) atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2003: 14). Jenis penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu: penelitian yang dilakukan untuk menekankan analisisnya pada data-data numerik (berupa angka) yang diolah dengan metode statistik tertentu dan seorang peneliti berusaha untuk mendeskripsikan gejala-gejala sektor secara tepat dan ringkas suatu situasi kondisi pada masa sekarang. Analisa kuantitatif adalah metode analisis dengan melakukan perhitungan terhadap data yang bersifat pembuktian dari masalah.

Penelitian ini bermaksud untuk menguji pengaruh dari variabel bebas/independen (X), yaitu Pertumbuhan Ekonomi (P_E) (X_1), Tingkat Inflasi (T_I) (X_2) dan Pendapatan Perkapita Regional (P_{Pr}) (X_3) terhadap variabel terikat/dependen (Y) yaitu Penerimaan Pajak Daerah. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda model data panel.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pengambilan lokasi obyek penelitian pada Kabupaten/Kota di Malang Raya wilayah Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang. Penelitian ini menganalisis tentang penerimaan pajak Daerah seluruh Kabupaten/Kota di Malang Raya wilayah Provinsi Jawa Timur mulai dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016.

Dimana penelitian ini yang fokus bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak Daerah Kabupaten/Kota di Malang Raya wilayah Provinsi Jawa Timur dan mengidentifikasi pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan pendapatan perkapita regional terhadap penerimaan pajak Daerah pada seluruh Kabupaten/Kota di Malang Raya wilayah Provinsi Jawa Timur mulai dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016.

C. Definisi Operasional Variabel

Untuk memudahkan dalam pengumpulan data dan analisis data, maka diperlukan suatu definisi operasional variabel untuk memudahkan dan menghindari kesalahan dalam mengartikan. Maka peneliti akan memberikan beberapa definisi dari masing-masing obyek penelitian yang diteliti, sehingga obyek yang diteliti mudah dipahami oleh pembaca. Variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik

kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu: variabel independen dan variabel dependen.

Adapun variabel dan definisi operasional penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Variabel dependen atau terikat dilambangkan dengan notasi Y adalah Penerimaan Pajak Daerah.

Penerimaan Pajak Daerah yaitu: Menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- b. Variabel independent atau bebas (X) adalah variabel yang dapat menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen atau terikat (Y).

Maka berdasarkan judul yang peneliti ajukan, untuk variabel independent dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1) Pertumbuhan Ekonomi (X_1)

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari perubahan indikator ekonomi makro yaitu: perubahan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan Kabupaten/Kota di Malang Raya wilayah Provinsi Jawa Timur, dengan satuan persen.

Pertumbuhan yang dimaksudkan adalah pertumbuhan ekonomi PDRB ADHK 2000 rata-rata mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 pada masing-masing Kabupaten/Kota di Malang Raya wilayah Provinsi Jawa Timur.

2) Tingkat Inflasi (X_2)

Merupakan kenaikan harga secara umum dan terus menerus dari barang/komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Inflasi dapat diukur dengan melihat sejumlah besar barang dan jasa serta menghitung kenaikan harga rata-rata selama beberapa periode waktu.

3) Pendapatan Perkapita Regional (X_3)

Merupakan perkiraan pendapatan perorangan yang diperoleh dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku pertahun dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun atau dengan kata lain pendapatan perkapita merupakan hasil bagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 pada masing-masing Kabupaten/Kota di Malang Raya wilayah Provinsi Jawa Timur.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan sebagai input analisis adalah data kuantitatif dan data sekunder. Data sekunder yang digunakan meliputi Data Pertumbuhan Ekonomi, Data Tingkat Inflasi, Data PDRB ADHK, Data Jumlah Penduduk dan Data Penerimaan Pajak Daerah. Dimana untuk seluruh data menurut Kabupaten/Kota di Malang Raya wilayah Provinsi Jawa Timur dari tahun

penelitian 2012 sampai dengan tahun 2016. Data-data kuantitatif digunakan sebagai input dari penggunaan metode dalam analisis data yang dipakai dalam penelitian.

Sumber utama data dalam penelitian ini berasal dari Dinas Pendapatan Kota Batu, Dinas Pendapatan Kota Malang, Dinas Pendapatan Kabupaten Malang serta BPS Jawa Timur. Sedangkan informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal, media massa maupun media elektronika (internet).

E. Metode Pengumpulan Data

a. Teknik Dokumenter

Teknik atau proses untuk memperoleh data dengan jalan mencatat dan merekam data-data yang telah dipublikasikan oleh lembaga atau instansi terkait dengan penelitian.

b. Studi Pustaka

Merupakan penelitian dengan mempelajari literatur-literatur di perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dan digunakan untuk mencari landasan teori sebagai acuan dalam penelitian, sehingga dapat melakukan dugaan-dugaan atau analisa.

Teknik pengumpulan data yaitu: metode dengan menggunakan dokumentasi, langkah ini berupa kegiatan mengumpulkan data-data sekunder dengan cara melihat atau menyalin catatan kertas kerja. Pengumpulan data diperoleh melalui telaah kepustakaan dan hasil publikasi. Adapun data yang dibutuhkan dan berhubungan dengan penelitian adalah:

1. Data Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/Kota di wilayah Malang Raya Tahun 2012 – 2016.
2. Data Tingkat Inflasi menurut Kabupaten/Kota di wilayah Malang Raya Tahun 2012 – 2016.
3. Data PDRB ADHK 2000 menurut Kabupaten/Kota di wilayah Malang Raya Tahun 2012 – 2016.
4. Data Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di wilayah Malang Raya Tahun 2012 – 2016.
5. Data Penerimaan Pajak Daerah menurut Kabupaten/Kota di wilayah Malang Raya Tahun 2011 – 2016.
6. Data luas wilayah Malang Raya Tahun 2012 – 2016.
7. Peta administratif Kabupaten/Kota di Malang Raya wilayah Provinsi Jawa Timur.

F. Metode Analisa Data dan Uji Hipotesis

Metode analisa data digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan dalam suatu penelitian dan untuk memperhitungkan besarnya efek suatu perubahan dari suatu kejadian terhadap kejadian lainnya. Metode analisis data merupakan teknik menyederhanakan suatu data kedalam bentuk-bentuk yang mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasikan. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran-gambaran yang jelas mengenai kejadian yang diteliti berdasarkan analisa tersebut berguna dalam memecahkan masalah.

Setelah data terkumpul dan disusun lalu dilakukan analisis. Pengolahan dan analisis data menggunakan program *Microsoft Excel* Versi 2010 dan *SPSS* Versi 21.

Dimana alat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Analisa Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Malang Raya Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016

Tahap pertama dari proses pengolahan data adalah menyajikan serial data pada Kabupaten/Kota Di Malang Raya wilayah Provinsi Jawa Timur lima tahun terakhir dari tahun 2012 sampai tahun 2016 dalam pola tabulasi maupun grafik penerimaan pajak Daerah yang menurut Kabupaten/Kota di wilayah Malang Raya dari waktu ke waktu, maka dapat terdeteksi persentase penerimaan pajak Daerah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Selanjutnya alat untuk menganalisa dari obyek variabel dilakukan dengan menggunakan program *Microsoft Excel* Versi 2010. Pola data diidentifikasi dengan analisa visual terhadap tabel data. Dengan instrumen tabulasi data maupun grafik data, maka akan diduga pola data sementara, sehingga pola data akan *stasioner* atau *tren* dapat diketahui dan dieplorasi kondisinya pada setiap Kabupaten/Kota di wilayah Malang Raya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pertumbuhan merupakan hal, cara, hasil atau proses kerja bertumbuh, perkembangan, kemajuan. Jadi indikator nilai pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah pada Kabupaten/Kota di wilayah Malang Raya merupakan angka pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah dari kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dari itu rumus untuk menghitung *growth* adalah sebagai berikut:

$$\text{Growth (G}_t\text{)} = \frac{\text{PD}_t - \text{PD}_{t-1}}{\text{PD}_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana:

G_t = Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah yang dinyatakan dalam persen

PD_t = Penerimaan Pajak Daerah pada tahun t (PD pada tahun t)

PD_{t-1} = Penerimaan Pajak Daerah pada tahun t-1 (PD pada tahun t-1)

2. Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2011 : 105), Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen, jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel – variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antara sesama variabel independen sama dengan nol.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan lawannya, serta variance inflation factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel

independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1 / \text{Tolerance}$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai $\text{Tolerance} \leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2011 : 139), uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Ada cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di – studentized. Dasar analisis adalah sebagai berikut :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik – titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik – titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2011 : 160), Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mengikuti distribusi normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi menunjukkan asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji Linieritas

Pada uji linieritas merupakan salah satu uji yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui sejauh mana hubungan antar variabel. Menurut Ghozali (2011 : 167), uji linieritas adalah uji yang digunakan untuk melihat

apakah spesifikasi yang digunakan sudah benar atau tidak. Dengan uji linieritas akan diperoleh informasi apakah model empiris sebaiknya linier, kuadrat, atau kubik. Menurut Sudarmanto (2005 : 135), menggunakan koefisien signifikansi. Apabila nilai signifikansi yang digunakan untuk menolak atau menerima H_0 , maka nilai koefisien signifikansi tersebut harus dibandingkan dengan tingkat alpha yang dipilih oleh peneliti (5% atau 1%) maka Jika nilai $\text{sig } f < 0,05$ maka H_0 diterima asumsi linieritas terpenuhi sehingga dapat disimpulkan variabel X tersebut memiliki hubungan linear dengan Y dan sebaliknya H_0 akan ditolak jika mempunyai nilai yang lainnya.

3. Regresi Linier Berganda **Analisis Linier Berganda**

Menurut Ghozali (2011 : 96), analisis regresi linier berganda adalah analisis kolerasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel, dalam analisis regresi selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, variabel dependen, dalam variabel dependen diasumsikan random/stokastik, yang berarti mempunyai distribusi probabilistik, variabel independen / bebas diasumsikan memiliki nilai tetap (dalam pengambilan sampel yang berulang). Sedangkan menurut Sudarmanto (2005 : 160), menyatakan tentang perhitungan regresi linier berganda ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_4 X_4 + b_5 X_5 + b_6 X_6 + e$$

Keterangan :

Y = Nilai hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat

a = bilangan konstanta sebagai titik potong

b = koefisien regresi

x = variabel bebas.

e = Standart Error

Uji Hipotesis

Setelah model terbentuk, maka langkah awal selanjutnya adalah pengolahan data, untuk mengolah data ini peneliti menggunakan alat analisis dan variabel, dimana regresi ini digunakan atas hubungan dari suatu variabel bebas/independen (X) terhadap variabel terikat/dependen (Y). Hal ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas/independen secara simultan maupun parsial terhadap variabel terikat/dependen.

Untuk menguji hipotesis yang digunakan, pengujian menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linear berganda dihasilkan dengan cara memasukkan data variabel kedalam fungsi regresi. Pembuktian hipotesis dilakukan dengan:

1. Uji Signifikansi Parameter simultan (Uji F)

Menurut Ghazali (2011 : 98), uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas/independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama

terhadap variabel dependen/terikat. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau $H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$, artinya apakah semua variabel bebas/independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat/dependen.

Hipotesis:

H_0 = ditolak

H_A = diterima

Ketentuannya:

a. Jika nilai $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_A diterima.

Artinya dari variasi variabel bebas/independen dapat menerangkan variabel terikat/dependen dan terdapat pengaruh diantara variabel yang diuji, dengan kata lain kita menerima hipotesis yang menyatakan bahwa suatu variabel bebas/independen secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel terikat/dependen.

b. Jika nilai $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_A ditolak.

Artinya dari variasi variabel bebas/independen dapat menerangkan variabel terikat/dependen dan terdapat pengaruh diantara variabel yang diuji, dengan kata lain kita menerima hipotesis yang menyatakan bahwa suatu variabel bebas/independen secara simultan atau bersama-sama tidak mempengaruhi variabel terikat/dependen.

Hipotesis alternatifnya (H_A) tidak semua parameter secara

simultan sama dengan nol, atau $H_A : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$, artinya apakah semua variabel bebas/independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat/dependen. Maka nilai F statistik dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Keterangan:

F = Rasio (koefisien penentu)

R^2 = Koefisien determinasi

n = Jumlah observasi

k = Jumlah variabel bebas

2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Menurut Ghozali (2011 : 98), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual atau parsial dalam menerangkan variasi-variasi variabel dependen.

Nilai t_{hitung} diperoleh dengan rumus:

$$t_{hitung} = \frac{b_i}{Sb_i}$$

Dimana:

b_i = Koefisien regresi

Sb_i = Standar deviasi

Cara melakukan uji t adalah dengan membandingkan nilai statistik t hasil perhitungan (t_{hitung}) dengan nilai t tabel (t_{tabel}) pada

derajat kepercayaan (α) sebesar 5%. Maka ketentuan pengujian hipotesis dalam uji t sebagai berikut:

1) Jika nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_A diterima.

Artinya variasi variabel bebas/independen dapat menerangkan variabel terikat/dependen dan terdapat pengaruh diantara variabel yang diuji, dengan kata lain kita menerima hipotesis yang menyatakan bahwa suatu variabel bebas/independen secara individual mempengaruhi variabel terikat dependen.

2) Jika nilai $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_A ditolak.

Artinya variasi variabel bebas/independen tidak dapat menerangkan variabel terikat/dependen dan tidak terdapat pengaruh diantara variabel yang diuji, dengan kata lain kita menerima hipotesis yang menyatakan bahwa suatu variabel bebas/independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat/dependen.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut penjelasan Ghozali (2011 : 97), Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu (1) berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu (1) variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti untuk menggunakan nilai *Adjusted R²* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 nilai, *Adjusted R²* dapat naik atau turun apabila variabel independen ditambahkan pada model. Dalam kenyataannya nilai *Adjusted R²* dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif.

Dari penjelasan tentang koefisien determinasi R^2 yang sudah dijelaskan di atas berdasarkan menurut pendapat ahli sehingga peneliti memutuskan untuk menggunakan *Adjusted R²* dalam menjelaskan seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, untuk menginterpretasikan koefisien variabel bebas (independen) dapat menggunakan *ustandardized coefficients* maupun *standardized coefficients Beta* sehingga dengan menggunakan *standardized beta* mampu mengeliminasi perbedaan unit ukuran pada variabel independen tidak sama (kg, Rp, Liter, dll) maka sebaiknya interpretasi persamaan regresi menggunakan *unstandartdized beta*.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Malang Raya Wilayah Provinsi Jawa Timur

Malang Raya merupakan sebuah terminologi yang menjadi representasi kultural dari sebagian wilayah eks Karesidenan Malang, yaitu Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu. Hingga saat ini menjadi populer dengan kawasan Metropolitan Malang Raya. Istilah "Malang Raya" mulai populer ketika eks Kecamatan Batu, Kabupaten Malang, ditetapkan sebagai Kota Administratif pada tahun 2001. Hal ini berlanjut hingga Kota Batu ditetapkan sebagai Kota tersendiri. Dimana dalam perkembangannya, tiga Kepala Daerah di wilayah Malang Raya sering berkoordinasi dalam setiap kegiatan yang berpotensi melibatkan ketiga wilayah administratif tersebut. Hal ini menjadikan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang ditentukan tidak akan terjadi saling berbenturan antar-wilayah. (www.satujam.com/sejarah-kota-malang/, 2018).

B. Hasil Analisa

1. Hasil Analisa Perbedaan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Malang Raya Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016

Hasil penerimaan pajak daerah pada masing-masing Kabupaten/Kota di Malang Raya wilayah Provinsi Jawa Timur mulai Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Penerimaan Pajak Daerah Malang Raya tahun 2012-2016

Tahun	Kabupaten Malang	Kota Malang	Kota Batu
2012	71.301.888.449,61	158.642.650.581,89	28.187.860.661,00
2013	95.889.778.087,00	238.499.748.161,57	44.853.946.415,32
2014	102.408.650.526,00	278.885.189.548,87	62.807.445.882,00
2015	170.108.822.450,00	316.811.710.702,76	83.692.699.934,00
2016	191.399.578.232,88	374.641.673.420,19	88.757.389.919,00

Selanjutnya berdasarkan data penerimaan pajak Daerah pada Tabel 4.1 diatas, menunjukkan bahwa angka dalam penelitian pada Kabupaten/Kota di Malang Raya wilayah Provinsi Jawa Timur mulai Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Dimana secara garis besar dapat dinyatakan bahwa Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu mengalami peningkatan dalam sektor pendapatan daerahnya.

Gambar 4.1 Grafik Nilai Rata-rata Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Malang Raya Tahun 2012-2016

Sumber: Diolah dari BPS Provinsi Jatim, 2018

Berdasarkan tinjauan data statistik yang disajikan pada Gambar 4.2 diatas, menunjukkan bahwa perkembangan nilai rata-rata penerimaan pajak Daerah pada masing-masing Kabupaten/Kota di Malang Raya wilayah Provinsi Jawa Timur mulai dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016, bahwa terdeteksi nilai rata-rata perkembangan tertinggi adalah Kota Batu yang mencapai angka sebesar 11,50%, disebabkan adanya peningkatan penerimaan pajak daerah pada sektor pajak hiburan yang lebih dominan serta lebih tinggi sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan wilayah Kabupaten/Kota di wilayah Malang raya lainnya pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 (Lihat Lampiran V. Hal. 75).

Selain itu yang mencapai nilai rata-rata perkembangan terendah penerimaan pajak Daerah terdapat pada Kota Malang dengan mencapai angka sebesar 5,31%, yang dalam hal ini disebabkan peningkatan pada setiap tahunnya yang relatif stabil lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah Kabupaten/Kota di wilayah Malang raya lainnya pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 (Lihat Lampiran III. Hal. 74).

2. Hasil Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik dan Analisis Regresi Linier Berganda

a) Asumsi-Asumsi Klasik Regresi

Asumsi-asumsi klasik ini harus dilakukan pengujiannya untuk memenuhi penggunaan regresi linier berganda. Setelah diadakan perhitungan regresi berganda melalui alat bantu *SPSS for Windows*,

diadakan pengujian uji asumsi klasik regresi. Hasil pengujian disajikan sebagai berikut :

Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual tersebar normal atau tidak. Prosedur uji dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan ketentuan sebagai berikut :

Hipotesis yang digunakan :

H_0 : residual tersebar normal

H_1 : residual tidak tersebar normal

Jika nilai **sig.** (*p-value*) > 0,05 maka H_0 diterima yang artinya normalitas terpenuhi.

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.2

Tabel 4.2 : Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.04812410
Most Extreme Differences	Absolute	.092
	Positive	.092
	Negative	-.082
Kolmogorov-Smirnov Z		.502
Asymp. Sig. (2-tailed)		.962

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2018

Dari hasil perhitungan didapat nilai **sig.** sebesar 0.962 (dapat dilihat pada Tabel 4.2) atau lebih besar dari 0.05; maka ketentuan H_0 diterima yaitu bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ini untuk mengetahui korelasi antara sisaan yang diurutkan menurut waktu (*time series*) atau ruang (*cross section*). Dalam konteks regresi, model regresi linier klasik mengasumsikan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam sisaan (ϵ_i). Hal ini memperlihatkan bahwa model klasik mengasumsikan bahwa unsur sisaan yang berhubungan dengan pengamatan tidak dipengaruhi oleh sisaan yang berhubungan dengan pengamatan lain yang mana pun

Uji ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW-test). Hipotesis yang melandasi pengujian adalah:

$$H_0 : \rho = 0 \text{ (tidak terdapat autokorelasi di antara sisaan)}$$

$$H_1 : \rho \neq 0 \text{ (terdapat autokorelasi di antara sisaan)}$$

Statistik Durbin-Watson yang dirumuskan oleh statistik d, yaitu:

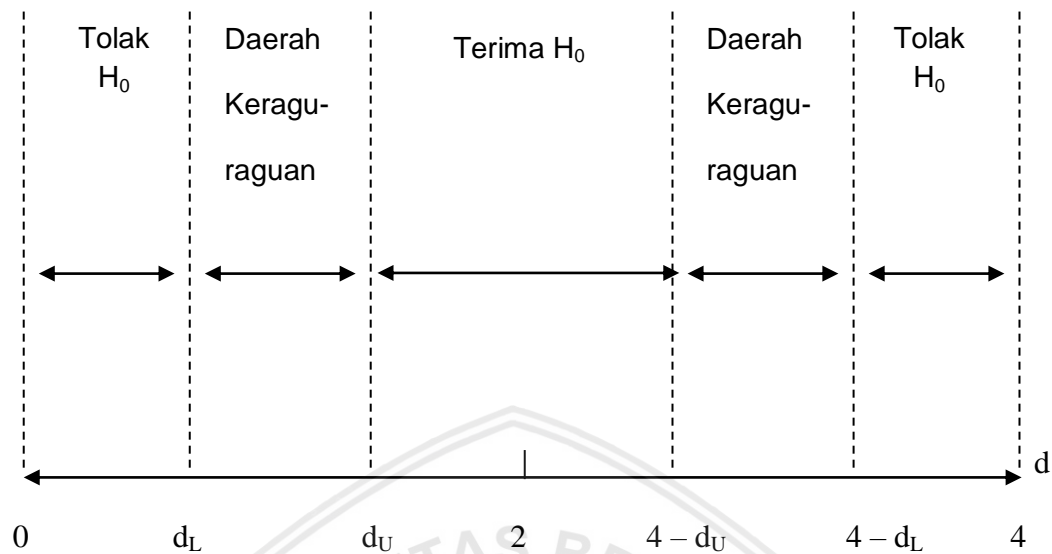
$$d = \frac{\sum (e_t - e_{t-1})^2}{\sum e^2}$$

Banyak pengamatan pada pembilang statistik d adalah $n - 1$ karena satu pengamatan hilang dalam mendapatkan perbedaan yang berurutan.

Prosedur uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut:

1. Dengan menggunakan Metode Kuadrat Terkecil (MKT) biasa, hitung koefisien regresi, kemudian tentukan e_i .

2. Dengan menggunakan rumus diatas hitung statistik d
3. Berdasarkan banyaknya pengamatan dan peubah penjelas tentukan nilai-nilai kritis d_L dan d_U .
4. Terapkan kaidah keputusan:
 - a. Jika $d < d_L$ atau $d > (4 - d_L)$, maka H_0 ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi terhadap sisaan.
 - b. Jika $d_U < d < (4 - d_U)$, maka H_0 diterima, berarti tidak terdapat autokorelasi antar sisaan.
 - c. Namun jika $d_L < d < d_U$ atau $(4 - d_U) < d < (4 - d_L)$, maka uji Durbin-Watson tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti (inconclusive). Untuk nilai-nilai ini, tidak dapat (pada suatu tingkat signifikansi tertentu) disimpulkan ada tidaknya autokorelasi di antara faktor-faktor gangguan.



Keterangan:

d_U = Durbin-Watson Upper (batas atas dari tabel Durbin-Watson)

d_L = Durbin-Watson Lower (batas bawah dari tabel Durbin-Watson)

Dari tabel Durbin-Watson untuk $n = 15$ dan $k = 3$ (adalah banyaknya variabel bebas) diketahui nilai d_U sebesar 1.750 dan $4 - d_U$ sebesar 2.250.

Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 4.3

Tabel 4.3: Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1,911

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2018

Dari Tabel 4.3 diketahui nilai uji Durbin Watson sebesar 1,911 yang terletak antara 1.649 dan 2.351, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi tidak terdapat autokorelasi telah terpenuhi.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas ini dilakukan untuk mengetahui bahwa tidak terjadi hubungan yang sangat kuat atau tidak terjadi hubungan linier yang sempurna atau dapat pula dikatakan bahwa antar variabel bebas tidak saling berkaitan. Cara pengujiannya adalah dengan membandingkan nilai Tolerance yang didapat dari perhitungan regresi berganda, apabila nilai tolerance $< 0,1$ maka terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 : Hasil Uji Multikolinieritas

Varaibel Bebas	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X1	0.797	1.254
X2	0.704	1.421
X3	0.857	1.167

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2018

Berdasarkan Tabel 4.4, berikut hasil pengujian dari masing-masing variabel bebas:

- Tolerance untuk Pertumbuhan Ekonomi adalah 0,797
- Tolerance untuk Tingkat Inflasi adalah 0,704
- Tolerance untuk Pendapatan Perkapita Regional adalah 0,857

Pada hasil pengujian didapat bahwa keseluruhan nilai tolerance $> 0,1$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas.

Uji multikolinieritas dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan nilai VIF (Variance Inflation Faktor) dengan angka 10.

Jika nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas. Berikut hasil pengujian masing-masing variabel bebas :

- VIF untuk Pertumbuhan Ekonomi adalah 1,254
- VIF untuk Tingkat Inflasi adalah 1,421
- VIF untuk Pendapatan Perkapita Regional adalah 1,167

Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Dengan demikian uji asumsi tidak adanya multikolinearitas dapat terpenuhi.

Uji Heterokedastisitas

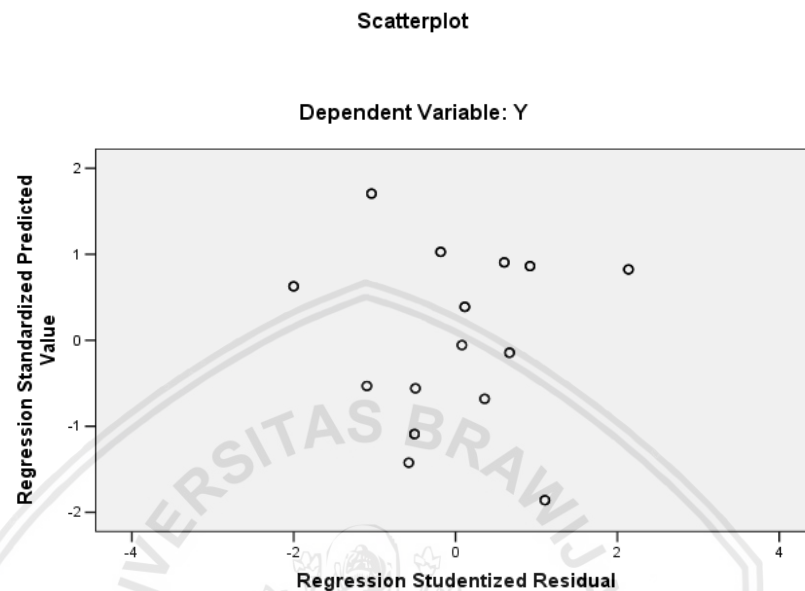
Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan nilai simpangan residual akibat besar kecilnya nilai salah satu variabel bebas. Atau adanya perbedaan nilai ragam dengan semakin meningkatnya nilai variabel bebas. Prosedur uji dilakukan dengan Uji scatter plot. Pengujian kehomogenan ragam sisaan dilandasi pada hipotesis:

H_0 : ragam sisaan homogen

H_1 : ragam sisaan tidak homogen

Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.1

Gamabr 4.2
Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2018

Dari hasil pengujian tersebut didapat bahwa diagram tampilan *scatterplot* menyebar dan tidak membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan mempunyai ragam homogen (konstan) atau dengan kata lain tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

Dengan terpenuhi seluruh asumsi klasik regresi di atas maka dapat dikatakan model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sudah layak atau tepat. Sehingga dapat diambil interpretasi dari hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan.

b) Persamaan Regresi Linier Berganda

Analisis regresi ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel bebas, yaitu Pertumbuhan Ekonomi (X_1), Tingkat Inflasi

(X_2), Pendapatan Perkapita Regional (X_3) terhadap variabel terikat yaitu Penerimaan Pajak Daerah (Y).

Persamaan Regresi

Persamaan regresi digunakan mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan menggunakan bantuan *SPSS for Windows ver 21.00* didapat model regresi seperti pada Tabel 4.5 :

Tabel 4.5 : Persamaan Regresi

Variabel Bebas	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7.942	0.049		160.973	0.000
X1	0.033	0.009	0.486	3.755	0.001
X2	-0.002	0.006	-0.037	-0.272	0.788
X3	0.028	0.006	0.542	4.346	0.000

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2018

Berdasarkan pada Tabel 4.5 didapatkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 7,942 + 0,033 X_1 - 0,002 X_2 + 0,028 X_3$$

Dari persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Penerimaan Pajak Daerah akan meningkat sebesar 0,033 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_1 (Pertumbuhan Ekonomi). Jadi apabila Pertumbuhan Ekonomi mengalami peningkatan 1 satuan, maka Penerimaan Pajak Daerah akan meningkat sebesar 0,033 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

- Penerimaan Pajak Daerah akan menurun sebesar 0.002 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_2 (Tingkat Inflasi), Jadi apabila Tingkat Inflasi mengalami peningkatan 1 satuan, maka Penerimaan Pajak Daerah akan menurun sebesar 0.002 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
- Penerimaan Pajak Daerah akan meningkat sebesar 0,028 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_3 (Pendapatan Perkapita Regional), Jadi apabila Tingkat Inflasi mengalami peningkatan 1 satuan, maka Penerimaan Pajak Daerah akan meningkat sebesar 0,028 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

c) Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui besar kontribusi variabel bebas (Pertumbuhan Ekonomi (X_1), Tingkat Inflasi (X_2), dan Pendapatan Perkapita Regional (X_3)) terhadap variabel terikat (Penerimaan Pajak Daerah) digunakan nilai R^2 , nilai R^2 seperti dalam Tabel 4.6 dibawah ini:

Tabel 4.6
Koefisien Korelasi dan Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
0.808	0.653	0.613

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2018

Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh atau kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari analisis pada Tabel 4.6 diperoleh hasil adjusted R^2 (koefisien determinasi) sebesar 0,613. Artinya bahwa 61,3% variabel Penerimaan Pajak Daerah akan dipengaruhi

oleh variabel bebasnya, yaitu Pertumbuhan Ekonomi (X_1), Tingkat Inflasi (X_2), dan Pendapatan Perkapita Regional (X_3). Sedangkan sisanya 38,7% variabel Penerimaan Pajak Daerah akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Selain koefisien determinasi juga didapat koefisien korelasi yang menunjukkan besarnya hubungan antara variabel bebas yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, dan Pendapatan Perkapita Regional dengan variabel Penerimaan Pajak Daerah, nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0.802, nilai korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas yaitu Pertumbuhan Ekonomi (X_1), Tingkat Inflasi (X_2), dan Pendapatan Perkapita Regional (X_3) dengan Penerimaan Pajak Daerah termasuk dalam kategori sangat kuat karena berada pada selang 0,8 – 1,0.

d) Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan bagian penting dalam penelitian, setelah data terkumpul dan diolah. Pengujian hipotesis adalah untuk menjawab hipotesis yang dibuat oleh peneliti.

Hipotesis I (F test / Serempak)

Pengujian F atau pengujian model digunakan untuk mengetahui apakah hasil dari analisis regresi signifikan atau tidak, dengan kata lain model yang diduga tepat/sesuai atau tidak. Jika hasilnya signifikan, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sedangkan jika hasilnya tidak signifikan, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini dapat juga dikatakan sebagai berikut :

H_0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$

H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$

Tabel 4.7
Hasil Uji F/Serempak

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	0.126	3	0.042	16.318	0.000
Residual	0.067	26	0.003		
Total	0.194	29			

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2018

Berdasarkan Tabel 4.7 nilai F hitung sebesar 16,318. Sedangkan F tabel ($\alpha = 0.05$; db regresi = 3 : db residual = 26) adalah sebesar 2,975. Karena F hitung $>$ F tabel yaitu $16,318 > 2,975$ atau nilai sig F ($0,000 < \alpha = 0.05$) maka model analisis regresi adalah signifikan. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel terikat (Penerimaan Pajak Daerah) dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel bebas (Pertumbuhan Ekonomi (X_1), Tingkat Inflasi (X_2), dan Pendapatan Perkapita Regional (X_3)).

Hipotesis II (t test / Parsial)

t test digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Dapat juga dikatakan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka hasilnya signifikan dan berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sedangkan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ maka hasilnya tidak signifikan dan berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hasil dari uji t dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8
Hasil Uji t / Parsial

Variabel bebas	t Hitung	Sig.	Keterangan
(Constant)	160.973	0.000	
X1	3.755	0.001	Signifikan
X2	-0.272	0.788	Tidak Signifikan
X3	4.346	0.000	Signifikan

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2018

Berdasarkan Tabel 4.8 diperoleh hasil sebagai berikut :

- t test antara X_1 (Pertumbuhan Ekonomi) dengan Y (Penerimaan Pajak Daerah) menunjukkan t hitung = 3,755. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 26) adalah sebesar 2,056. Karena t hitung > t tabel yaitu $3,755 > 2,056$ atau nilai sig t ($0,001$) < $\alpha = 0,05$ maka pengaruh X_1 (Pertumbuhan Ekonomi) terhadap Penerimaan Pajak Daerah adalah signifikan. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Daerah dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Pertumbuhan Ekonomi atau dengan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi maka Penerimaan Pajak Daerah akan mengalami peningkatan secara nyata.
- t test antara X_2 (Tingkat Inflasi) dengan Y (Penerimaan Pajak Daerah) menunjukkan t hitung = 0,272. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 26) adalah sebesar 2,056. Karena t hitung < t tabel yaitu $0,272 < 2,056$ atau nilai sig t ($0,788$) > $\alpha = 0,05$ maka pengaruh X_2 (Tingkat Inflasi) terhadap Penerimaan Pajak Daerah adalah tidak signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan

bahwa Penerimaan Pajak Daerah dapat dipengaruhi secara tidak signifikan oleh Tingkat Inflasi atau dengan meningkatkan Tingkat Inflasi maka Penerimaan Pajak Daerah akan mengalami penurunan yang masih rendah.

- t test antara X_3 (Pendapatan Perkapita Regional) dengan Y (Penerimaan Pajak Daerah) menunjukkan t hitung = 4,346. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 26) adalah sebesar 2,056. Karena t hitung > t tabel yaitu $4,346 > 2,056$ atau nilai sig t (0,000) < $\alpha = 0.05$ maka pengaruh X_3 (Pendapatan Perkapita Regional) terhadap Penerimaan Pajak Daerah adalah signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Daerah dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Pendapatan Perkapita Regional atau dengan meningkatkan Pendapatan Perkapita Regional maka Penerimaan Pajak Daerah akan mengalami peningkatan secara nyata.
- Dari hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah secara simultan dan parsial. Dan dari sini dapat diketahui bahwa ketiga variabel bebas tersebut yang paling dominan pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak Daerah adalah Pendapatan Perkapita Regional karena memiliki nilai koefisien beta dan t hitung paling besar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi dan Pendapatan Perkapita Regional Terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Kabupaten/Kota di Malang Raya wilayah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dideskripsikan pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh secara simultan (bersama-sama) tiap variabel bebas terhadap Penerimaan Pajak Daerah dilakukan dengan pengujian F-test. Dari hasil analisis regresi linier berganda diperoleh variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian terhadap hipotesis yang menyatakan bahwa adanya pengaruh secara bersama-sama (simultan) variabel bebas terhadap variabel Penerimaan Pajak Daerah dapat diterima.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara individu (parsial) variabel bebas (Pertumbuhan Ekonomi (X_1), Tingkat Inflasi (X_2), Pendapatan Perkapita Regional (X_3)) terhadap Penerimaan Pajak Daerah dilakukan dengan pengujian t-test. Berdasarkan pada hasil uji didapatkan bahwa terdapat dua variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak

3. Daerah yaitu Pertumbuhan Ekonomi (X_1) dan Pendapatan Perkapita Regional (X_3).
4. Berdasarkan pada hasil uji t didapatkan bahwa variabel Pendapatan Perkapita Regional mempunyai nilai t hitung dan koefisien beta yang paling besar. Sehingga variabel Pendapatan Perkapita Regional mempunyai pengaruh yang paling kuat dibandingkan dengan variabel yang lainnya maka variabel Pendapatan Perkapita Regional mempunyai pengaruh yang dominan terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

B. Saran

Maka dari itu dengan berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini dapat dibuat beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Malang Raya diperlukan adanya upaya yang lebih intensif dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan melalui cara-cara yang inovatif dalam rangka penentuan target sumber penerimaan daerah yang lebih baik. Walaupun sudah menunjukkan capaian kinerja adanya kemajuan melalui indikator realisasi penerimaan pajak daerah saat ini. Maka sangat penting untuk mengadopsi kebijakan dengan metode penguatan perencanaan pembangunan dan evaluasi kinerja pembangunan yang lebih tepat dengan disesuaikan dari kapasitas potensi atas sumber penerimaan daerah.
- 2) Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur mempunyai otonomi untuk mengkonseptualisasikan, mengembangkan dan mengimplementasikan kerangka perencanaan pembangunan mereka sendiri untuk disesuaikan

dengan konteks lokal secara terintegrasi. Sumber penerimaan pajak daerah yang berpotensi harus digunakan sebagai indikator yang fleksibel dan inovatif untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Melalui upaya-upaya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran guna menetapkan target penerimaan pajak daerah yang lebih besar dan menelusuri kinerja pembangunan yang lebih efektif dengan menciptakan peran kinerja serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik, sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yang memungkinkan terjadinya peningkatan kualitas pemerintahan yang proaktif dalam program pembangunan manajemen keuangan daerah.

3) Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan menggunakan obyek penelitian yang lebih luas dan menambah variabel-variabel bebas/independen selain dalam penelitian ini, agar dapat lebih eksplisit dalam mendeskripsikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah lebih mendalam. Dengan besar harapan dari peneliti kepada peneliti selanjutnya adalah untuk mengembangkan dan memperluas dari penelitian ini dengan melakukan penelitian pada obyek seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur atau seluruh wilayah Indonesia yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dan saran bagi instansi pemerintahan dalam melaksanakan peran kinerja dan kewenangannya pada setiap daerah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ausri, Amra. 2007. **Perpajakan Indonesia**. UPP AMP YKPN: Yogyakarta.
- Arsyad, Lincoln, 2004, **Ekonomi Pembangunan**; Edisi Keempat, Bagian Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN: Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Data Makro Sosial Ekonomi Tahun 2011-2016. Jawa Timur.
- Bruckner, Markus. 2011. **An Instrumental Variables Approach to Estimating Tax Revenue Elasticities: Evidence from Sub-Saharan Africa**
- Fidel. 2010. **Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan**. Murai Kencana: Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2011. **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21**. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Kamus Bahasa Indonesia. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa. Diperoleh tanggal 04 Nopember 2017 dari <http://perpus.unimus.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/Kamus-Besar-Bahasa-Indonesia.pdf>
- Karim, Adiwarmanto, A. 2007. **Ekonomi Makro Islami**, Rajawali Pers: Jakarta.
- Karim, Adiwarmanto, A. 2008. *Modul Istitusi Depositori dan Pasar Modal*, FEB UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. **Perpajakan. Edisi Revisi 2011**. Andi: Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2014. **Perpajakan: Teori dan Kasus**. Salemba Empat: Jakarta.
- Rosyidi, Suherman. 2002. **Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro (Edisi Revisi)**. Rajawali Pers: Depok

- Santoso, Purbayu Budi dan Muliawan Hamdani. 2007. **Statistik Deskriptif Dalam Bidang Ekonomi dan Niaga**. Erlangga: Jakarta.
- Sudarmanto, Gunawan. 2005. **Analisis Regresi Linier Ganda dengan SPSS**. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Sugiyono. 2003. **Metode Penelitian Bisnis**. Pusat Bahasa Depdiknas. Bandung
- Sugiyono. 2011. **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**, CV. Alfa beta: Bandung.
- Sugiyono. 2015. **Statistika Untuk Penelitian**, CV. Alfa beta: Bandung.
- Sukirno, Sadono. 2004. “**Teori Pengantar Makro Ekonomi**”, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Supranto, J. 2007. **Statistik dan Aplikasi**, Erlangga: Jakarta.
- Tandelilin, Eduardus. 2001. **Analisis investasi dan manajemen portofolio**. BPFE-UGM: Yogyakarta
- Tanzi, Vito. 1989. **Fiscal Policy and Economic Reconstruction in Latin America**: Cambridge University Press: Cambridge.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Republik Indonesia. Pokok-pokok Pengaturan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-undang No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

THESIS, SKRIPSI DAN JURNAL

- Anggraeni, Dina. 2010. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris pada Provinsi Bengkulu). *Skripsi Pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.*
- Aryana, I Made. 2011. Pengaruh Tarif Bea Masuk, Kurs dan Volume Impor Terhadap Penerimaan Bea Masuk Di Indonesia. *Tesis Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.*
- Ayuningtyas, Arniyanti. 2008. Analisis Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah (Studi kasus pada Seluruh Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah). *Skripsi pada FEIS UIN Jakarta.*
- Fachry Ali Rafsanjani, Kertahadi dan Siti Ragil Handayani. 2015. Pengaruh Tingkat Inflasi, Pengangguran dan Pendapatan Perkapita Regional Terhadap Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah (Studi Pada Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Periode Tahun 2004-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB), Vol. 6 No. 2 2015: perpajakan.studentjournal.ub.ac.id. PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.*
- Marieskha, Poppy. 2009. “Analisis Pengaruh PDRB, Suku Bunga dan Tingkat Inflasi Terhadap Simpanan Masyarakat Pada Bank-Bank Umum Di Sumatera Utara”, *Skripsi SI, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara.*
- Mayasari, Dian. 2009. *Kontibusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Analisis Terhadap Kabupaten dan Kota di Jawa Timur). Skripsi Pada FE UMM.*
- Nadya Fazriana H, Hadi S. 2013. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal. *Jurnal: Volume 3, Nomor 1, Tahun 2013, Halaman 1-13, ISSN (Online): 2337-3814. <http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/jme>. Semarang.*
- Prastyo Nuswantara, Bangun. (2010). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Di kota Surabaya. *Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN Veteran. Surabaya.*

- Purnamasari, Gita. 2011. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Indonesia. *Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Komputer Indonesia, Bandung.*
- Rumpoko, Andian Puji. 2013. Strategi Peningkatan Swasembada Beras Provinsi Jawa Timur Tahun 2020. *Naskah Publikasi Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.*
- Utami, Sri. 2015. Pengaruh Struktur Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Terhadap Rasio Pajak Pada Negara-Negara ASEAN. *Skripsi Pada Jurusan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta).*
- Wijayanti, Amalia. 2015. Analisis Penerimaan Pajak Indonesia (Pendekatan Ekonomi Makro). *Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.*
- Woro, Utari. 2008. Analisis Fundamental Ekonomi Makro Serta Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Skripsi, Universitas Trunojoyo Madura*

INTERNET

- www.pps.unud.ac.id.
- www.bpsjatim.go.id
- <http://bpkad.malangkab.go.id/#>
- <http://bpkad.malangkota.go.id/>
- <http://www.pajak.go.id>
- <https://satujam.com/sejarah-kota-malang/>

LAMPIRAN

Lampiran I. Data Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Malang Raya Tahun 2012-2016

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Malang Raya Tahun 2012-2016				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kabupaten Malang	3.52	4.58	6.51	7.06	3.01
2	Kota Malang	6.73	9.11	2.69	7.18	2.27
3	Kota Batu	3.85	7.10	9.08	8.20	8.81

Lampiran II. Data Pajak Daerah (PPD) Kabupaten/Kota Di Malang Raya Tahun 2012-2016

Data Pajak Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Malang Taya Tahun 2012-2016			
Tahun	Kabupaten Malang	Kota Malang	Kota Batu
2012	71.301.888.449,61	158.642.650.581,89	28.187.860.661,00
2013	95.889.778.087,00	238.499.748.161,57	44.853.946.415,32
2014	102.408.650.526,00	278.885.189.548,87	6.578.433.651,00
2015	170.108.822.450,00	316.811.710.702,76	83.692.699.934,00
2016	191.399.578.232,88	374.641.673.420,19	88.757.389.919,00

Lampiran III. Data Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

Pajak Daerah	2012	2013	2014	2015	2016
Hotel	1.404.334.544,00	1.606.446.328,00	1.708.786.073,00	2.163.869.133,00	2.770.564.495,00
Restoran	1.187.235.660,00	1.517.134.567,00	1.626.493.988,00	2.985.478.784,00	4.139.116.892,88
Hiburan	5.816.167.110,00	6.473.333.207,00	5.983.383.252,00	6.645.138.994,00	8.692.449.771,00
Reklame	2.137.858.516,00	2.824.466.103,00	3.025.650.276,00	3.016.200.621,00	3.343.988.922,00
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	32.391.579.296,00	37.557.010.691,00	44.128.822.842,00	54.232.695.610	58.151.585.755,00
Mineral Bukan Logam	403.188.210,00	650.666.237,00	805.141.500,00	672.771.720,00	927.579.200,00
Parkir	258.092.700,00	304.525.250,00	425.508.050,00	778.522.500,00	767.922.000,00
Sarang Burung	17.178.750,00	18.800.000,00	13.408.750,00	10.858.750,00	10.209.750,00
Air Tanah	2.257.008.532,00	2.677.288.437,00	2.747.489.909,00	2.745.119.565,00	2.930.718.765,00
Bphtb	25.429.245.131,61	42.270.107.267,00	41.943.965.886,00	44.722.007.485,00	49.301.866.413,00
Pbb	-	-	-	52.136.159.288	60.363.576.269,00
Jumlah	71.301.888.449,61	95.899.778.087,00	102.408.650.526,00	170.108.822.450,00	191.399.578.232,88

Lampiran IV. Data Penerimaan Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2012-2016

Jenis Pajak	2012	2013	2014	2015	2016
<u>Pajak Hotel</u>	9.787.551.997,94	13.934.800.659,87	25.069.057.562,87	31.828.508.228,43	37.857.637.844,26
<u>Pajak Restoran</u>	20.302.610.876,34	25.479.671.734,31	30.473.435.484,90	39.071.320.184,22	47.498.229.279,93
<u>Pajak Hiburan</u>	3.134.172.824,60	4.083.522.176,70	5.140.722.135,41	6.031.213.792,94	6.610.023.251,65
<u>Pajak Reklame</u>	9.256.619.495,45	10.716.211.079,75	19.390.018.667,52	19.557.043.020,32	22.101.587.217,25
<u>Pajak Penerangan Jalan</u>	29.144.310.775,76	33.996.908.886,90	39.941.959.559,27	45.805.478.131,18	47.568.068.965,81
<u>Pajak Parkir</u>	1.796.786.915,00	1.939.867.733,00	2.643.529.810,00	3.662.965.828,90	4.887.815.130,00
<u>Pajak Air Tanah</u>	509.265.868,70	694.747.885,20	819.219.964,44	777.523.080,54	809.743.186,19
<u>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</u>	-	47.843.891.288,04	53.881.514.370,52	58.611.532.685,00	62.416.413.408,00
<u>Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan</u>	84.711.331.828,10	99.810.126.717,80	101.525.731.993,94	111.466.125.751,23	144.892.155.137,10
<u>Jumlah</u>	158.642.650.581,89	238.499.748.161,57	278.885.189.548,87	316.811.710.702,76	374.641.673.420,19

Lampiran V. Data Penerimaan Pajak Daerah Kota Batu Tahun 2012-2016

Jenis Pajak	2012	2013	2014	2015	2016
Pajak Hotel	5.244.491.392,00	6.592.700.658,00	14.390.391.081,00	16.533.613.716,00	17.944.383.056,00
Pajak Restoran	1.697.168.121,00	2.280.251.940,00	3.994.449.379,00	5.874.199.585,00	7.495.007.628,00
Pajak Hiburan	3.402.281.809,00	6.296.771.461,00	6.019.223.859,00	7.669.602.854,00	10.023.704.360,00
Pajak Reklame	606.574.334,00	621.183.798,00	504.821.136,00	470.671.373,00	1.603.625.203,00
Pajak Penerangan Jalan	5.521.137.467,00	7.263.670.788,00	8.577.158.978,00	9.702.985.905,00	10.417.809.198,00
Pajak Parkir	514.102.457,00	621.362.919,00	835.458.838,00	917.778.602,00	1.140.417.722,00
Pajak Air Tanah	689.989.879,00	707.771.590,00	697.703.981,00	716.003.984,00	1.425.148.171,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	-	7.635.070.761,32	10.245.426.431,00	11.284.043.302,00	18.108.653.606,00
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	10.512.115.202,00	12.835.162.500,00	17.542.812.199,00	30.523.800.613,00	20.608.640.975,00
Jumlah	28.187.860.661,00	44.853.946.415,32	62.807.445.882,00	83.692.699.934,00	88.757.389.919,00

**Lampiran VI. Data Tingkat Inflasi (TI) Kabupaten/Kota Di Malang Raya
Tahun 2012-2016**

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Inflasi Kabupaten/Kota Di Malang Raya Tahun 2012-2016				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kabupaten Malang	3.23	5.77	6.95	11.03	17.11
2	Kota Malang	2.40	3.65	7.92	8.81	12.14
3	Kota Batu	3.17	4.38	6.21	7.42	9.06

**Lampiran VII. Data Pendapatan Perkapita Regional (PPr) Kabupaten/Kota
Di Malang Raya Tahun 2012-2016**

No	Kabupaten/Kota	PDRB Perkapita Kabupaten/Kota Di Malang Raya Tahun 2012-2016 (Dalam Jutaan Rupiah)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kabupaten Malang	6.91	6.97	7.05	7.16	7.17
2	Kota Malang	10.47	10.80	10.66	10.02	9.06
3	Kota Batu	2.98	3.07	2.65	2.42	1.86

Lampiran VIII. Susunan Data Panel

Daerah	Tahun	Periode	Y	X1	X2	X3	
Kabupaten Malang	2012	Semester I	35650944224,81	3,52	4,60	6,91	
		Semester II	35594733587,67	3,50	4,70	6,92	
	2013	Semester I	47949889043,50	4,58	7,92	6,97	
		Semester II	48003102334,67	4,60	7,91	6,98	
	2014	Semester I	51204325263,00	6,51	8,14	7,05	
		Semester II	51224218769,43	6,52	8,12	7,07	
	2015	Semester I	85054411225,00	7,06	3,32	7,16	
		Semester II	84966530987,21	7,03	3,31	7,17	
	2016	Semester I	95699789116,44	3,01	2,62	7,17	
		Semester II	95700875342,54	3,04	2,63	7,19	
	Kota Malang	2012	Semester I	79321325290,95	6,26	4,60	10,47
			Semester II	79299743265,87	6,25	4,70	10,46
		2013	Semester I	119249 874080,79	6,20	7,92	10,80
			Semester II	119238998876,90	6,19	7,90	10,82
2014		Semester I	139442594774,44	5,80	8,14	10,66	
		Semester II	140008479654,76	5,82	8,15	10,67	
2015		Semester I	158405855351,38	5,61	3,32	10,02	
		Semester II	158411152876,04	5,63	3,33	10,01	
2016		Semester I	187320836710,10	5,61	2,62	9,06	
		Semester II	187332123768,55	5,63	2,64	9,05	
Kota Batu		2012	Semester I	14093930330,50	3,85	4,64	2,98
			Semester II	14100212143,12	3,87	4,65	2,99
		2013	Semester I	22426973207,66	7,10	6,72	3,07
			Semester II	22427052318,70	7,13	6,74	3,08
	2014	Semester I	3289216825,50	9,08	6,21	2,65	
		Semester II	3276959978,00	9,09	6,20	2,64	
	2015	Semester I	41846349967,00	8,20	7,42	2,42	
		Semester II	41863507632,98	8,21	7,40	2,43	
	2016	Semester I	44378694959,50	8,81	9,06	1,86	
		Semester II	44378888543,17	8,83	9,08	1,88	

Lampiran IX. Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	30	8.01	8.28	8.1273	.08171
X1	30	1.13	4.56	2.9900	1.19627
X2	30	1.20	8.56	3.6417	1.95851
X3	30	.93	5.40	3.3090	1.60257
Valid N (listwise)	30				

Lampiran X. Asumsi Klasik

1. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.808 ^a	.653	.613	.05082	1.911

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

2. Uji Multikolinearitas

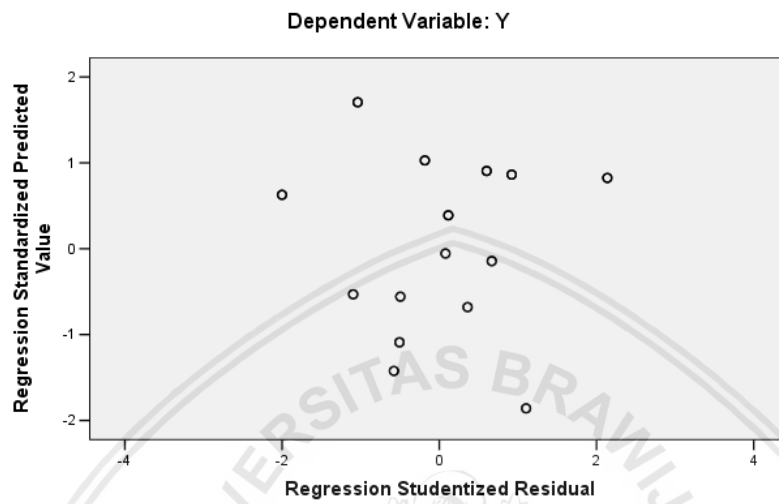
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.797	1.254
	X2	.704	1.421
	X3	.857	1.167

a. Dependent Variable: Y

3. Uji Heterokedastisitas

Scatterplot



4. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.04812410
Most Extreme Differences	Absolute	.092
	Positive	.092
	Negative	-.082
Kolmogorov-Smirnov Z		.502
Asymp. Sig. (2-tailed)		.962

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Lampiran XI. Regresi Linier Berganda

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y	8.1273	.08171	30
X1	2.9900	1.19627	30
X2	3.6417	1.95851	30
X3	3.3090	1.60257	30

Correlations

		Y	X1	X2	X3
Pearson Correlation	Y	1.000	.595	-.461	.639
	X1	.595	1.000	-.450	.171
	X2	-.461	-.450	1.000	-.378
	X3	.639	.171	-.378	1.000
Sig. (1-tailed)	Y	.	.000	.005	.000
	X1	.000	.	.006	.184
	X2	.005	.006	.	.020
	X3	.000	.184	.020	.
N	Y	30	30	30	30
	X1	30	30	30	30
	X2	30	30	30	30
	X3	30	30	30	30

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X3, X1, X2 ^a	.	Enter

- a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Ln_Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.808 ^a	.653	.613	.05082	1.911

- a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2
b. Dependent Variable: Y

Lampiran XII. Hasil Uji Hipotesis

1. Hasil Uji F/Simultan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.126	3	.042	16.318	.000 ^a
	Residual	.067	26	.003		
	Total	.194	29			

- a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2
b. Dependent Variable: Y

2. Hasil Uji t/Parsial

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.942	.049		160.973	.000
	X1	.033	.009	.486	3.755	.001
	X2	-.002	.006	-.037	-.272	.788
	X3	.028	.006	.542	4.346	.000

- a. Dependent Variable: Y